

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Nordiawan (2010), teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principal*. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust*, amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward*, manajemen) yang lebih *capable* dan siap.

Kontrak hubungan antara *stewards* (pemerintah) dan *principals* (masyarakat) atas dasar kepercayaan, bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Teori ini merupakan penatalayanan dimana kaitannya terhadap organisasi di dalam pemerintahan.

Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini, diharapkan mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik. Sebagai organisasi sektor publik pemerintah daerah juga dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

2. Teori COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan *Internal Control–Integrated Framework* pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur. COSO menyebutkan, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.

- b. Penilaian risiko dilakukan karena ada anggapan bahwa akan selalu ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko melibatkan proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.
- d. Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung tercapainya tujuannya. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung berfungsinya pendamping pengendalian internal lainnya. Komunikasi adalah proses penyampaian, berbagi, dan memperoleh informasi yang terus-menerus berulang.
- e. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal telah dilaksanakan dan berfungsi maka dilakukan evaluasi. Terdapat tiga jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya.

3. Teori Kompetensi Spencer

Penelitian ini menggunakan teori kompetensi spencer untuk menjelaskan tentang komepetnsi sumber daya manusia. Secara sederhana kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *competence at work*, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Kompetensi juga dapat dipakai untuk mengukur kinerja seseorang dengan kriteria tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi yang disebutkan oleh Spencer dan Spencer (1993), yaitu, *motives* (suatu hal yang membuat seseorang secara konsisten melakukan tindakan tertentu), *traits* (sifat seseorang dalam merespon situasi tertentu), *self concept* (sikap seseorang), *knowledge* (pengetahuan dibidang tertentu), dan *skills* (kemampuan yang dimiliki pada bidang tertentu).

Disebutkan pula bahwa dimasa depan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbasis kompetensi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adanya tindakan responsif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi dapat berupa upaya pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, menuntut individu mampu menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerjanya (Moeheriono, 2009).

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Menurut Suwardjono (2012), pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan, dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan sosial. Laporan keuangan pemerintah juga menyediakan informasi yang mengenai posisi keuangan daerah untuk seluruh transaksi pada suatu entitas pelaporan dalam satu periode.

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga merupakan suatu landasan bagi para aparatur pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparansi, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan tersebut dapat tercapai.

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Wiley dalam Azhar (2007) mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

7. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2013: 163), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 pasal 3, unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas lima unsur yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*); komponen ini mencakup sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus, mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.
- b. Penilaian/Penentuan Resiko (*risk assessment*); komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang, mencakup: penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi resiko.
- c. Aktivitas Pengendalian (*control activities*); komponen ini mencakup aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal, mencakup: persetujuan, tanggung jawab, dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.
- d. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*); komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen.
- e. Pemantauan (*monitoring*); merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan untuk tujuan manajemen pengendalian.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Sistem Pengendalian Intern pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah akan menuntun OPD dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan apabila sistem pengendalian internal pemerintah diyakini dapat terlaksana dengan baik oleh OPD maka implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan juga akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Dalam Teori COSO mengemukakan 5 komponen sistem pengendalian intern, salah satunya adalah informasi dan komunikasi sebagai wujud tanggung jawab pengendalian intern untuk mendukung tercapainya tujuan. Adanya sistem pengendalian intern yang baik maka akan mempengaruhi penerapan SAP yang diterapkan dan akan memenuhi kriteria.

Herawati (2014) SPI adalah kebijakan dan prosedur yang disusun untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pihak manajemen bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Peneliti menduga sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sejalan dengan pernyataan tersebut sistem pengendalian intern yang baik akan mempengaruhi SAP yang diterapkan.

Penelitian menduga bahwa semakin bagus sistem yang dimiliki aparat maka akan membuat penerapan standar akuntansi pemerintah lebih efektif dan kualitas laporan keuangan yang dibuat akan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kriteria, sehingga instansi mampu memberikan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian intern dapat terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah yang efisien.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Amar (2013) yang menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H1: *Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah*

2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan di terapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Dengan demikian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi permasalahan, yang dapat diukur dari kemampuannya untuk menjadi pelaku kinerja yang efektif.

Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan SDM yang handal serta memahami masalah penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi SAP. Kompetensi SDM yang lemah dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode, teknik dan ketentuan baku yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintahan, sehingga laporan keuangan yang dibuat juga akan salah. Dengan adanya teori Kompetensi Spencer tidak akan lemah apabila memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan maka akan berpengaruh signifikan

penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Teori Kompetensi Spencer mengemukakan lima karakteristik kompetensi salah satunya adalah *skills* dimana tingkat kemampuan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan mempengaruhi penerapan SAP yang akan diterapkan dan akan memenuhi kriteria.

Penelitian mengenai Kompetensi SDM terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dengan kaitan adanya pertanggungjawaban dalam menyampaikan laporan keuangan. (Fistarini dan Darman, 2009) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi SDM dengan penerapan SAP sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H2: *Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah*

3. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Dengan adanya teori *stewardship* yang diterapkan dimana masyarakat mempercayakan kepada pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, sehingga diharapkan pemerintah mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Menurut teori COSO salah satu dari komponennya yaitu informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendukung tercapainya tujuan, pemerintah juga membutuhkan informasi yang relevan dan berkualitas baik untuk mendukung tercapainya dalam menyajikan laporan keuangan secara lengkap.

Dengan mengacu pada SAP peneliti menduga setelah diterapkannya SAP maka laporan keuangan berikutnya telah

memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang diterbitkan diharapkan disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Hal senada diungkapkan (Ningtyas dan Widyawati, 2015) yang menyatakan bahwa dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud menguji kembali hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan OPD. Hipotesisnya sebagai berikut:

H3: *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD*

4. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku, yang diperlukan dalam melaksanakan

tugas dan jabatannya (Safri, 2002). Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS yang menyebutkan bahwa: "Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, efektif dan efisien".

Kompetensi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Teori kompetensi spencer menyatakan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adanya tindakan responsive untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi dapat berupa pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, menuntut individu mampu menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerjanya. Hal tersebut dengan adanya kemampuan dan kemauan

dalam melaksanakan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien maka organisasi mampu mencapai tujuannya.

Peneliti menduga bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Nurillah (2014) dan Ihsanti (2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif, terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang sama dilakukan Fadilah(2013) menunjukkan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

5. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan

yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, sertaakan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Sistem pengendalin intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasioperasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Menurut teori COSO, sistem pengendalian intern merupakan pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien. Adanya sistem pengendalian intern yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baiktermasuk dalam prosedur penyajian laporan keuangannya, sistem yang baik maka akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian

yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti(2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H5: *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD.*

6. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang memediasi oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Efektivitas pengendalian intern atas keandalan pelaporan keuangan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui pencegahan dan deteksi prosedur dan estimasi error (Doyle *et al*, 2007). Hasil pelaporan keuangan akan lebih andal dan berkualitas jika organisasi juga menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Dalam teori COSO mengemukakan 5 komponen salah satunya adalah informasi dan komunikasi sebagai wujud tanggung jawab. Sistem pengendalian intern akan menuntun OPD dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, apabila sistem pengendalian intern diyakini dapat terlaksana dengan baik oleh OPD maka implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah

juga akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan dengan baik pula.

Sistem pengendalin intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Irwan (2011) menyatakan bahwa SPIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa SAP dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan memenuhi empat karakteristik yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi SPI pada kualitas Laporan Keuangan melalui SAP sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H6: *Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP.*

7. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang memediasi oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

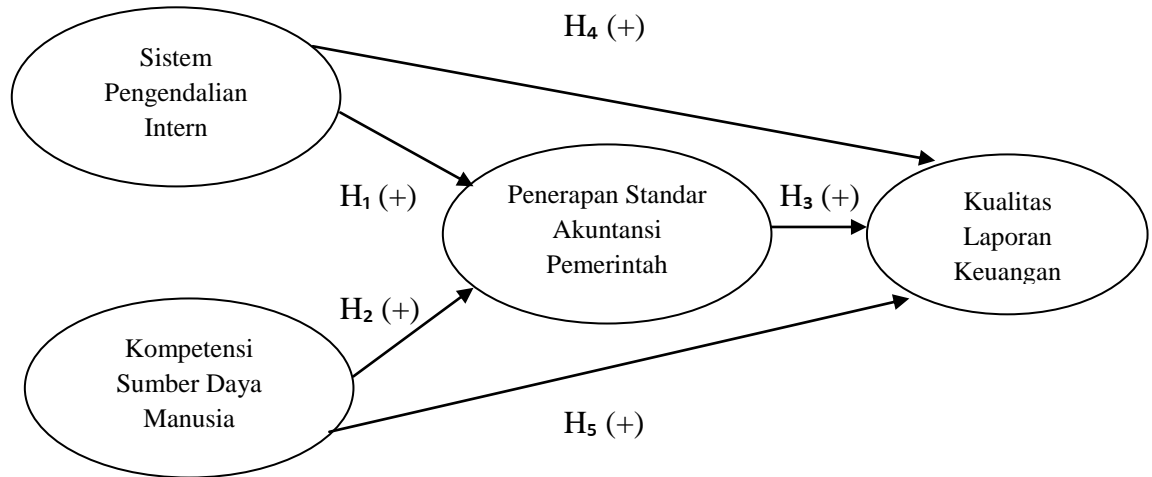
Penyusunan Laporan keuangan berkualitas memerlukan keahlian SDM yang berkaitan dengan penerapan SAP yang meliputi pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana cadangan (Irwan, 2011).

Laporan keuangan harus disiapkan oleh personil yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan sistem akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya serta akan meminimalisir resiko terjadinya kekeliruan pelaporan keuangan (Warren *et al*, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan melalui SAP sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H7: *Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP*

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian